

KOMPETENSI MAHASISWA (ANALISIS MASALAH MENGENAI MASYARAKAT 'SALAH SATU MASALAHNYA')

Jenis Masalah	Masalah yang Diidentifikasi	Analisis Identifikasi Masalah
Masyarakat yang kecanduan sosial media	Pengaruh sosial media terhadap kesehatan fisik dan mental dewasa, remaja, dan anak-anak	Semakin berkembangnya teknologi tidak hanya memberikan dampak positif pada penggunaan sosial media, namun juga ada risiko yang terlibat. Penggunaan sosial media secara terus menerus dapat membahayakan kesehatan mental. Seperti rasa iri, tidak mampu dan kurang puas dengan hidup dapat menjadi dampak yang mungkin terjadi akibat terlalu banyak dan lama dalam menggunakan sosial media. Penggunaan smartphone untuk bermain media sosial dengan jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan kecanduan sehingga seseorang cenderung menunda waktu tidur yang dapat menyebabkan insomnia. Adapun gangguan mental seperti stress dan depresi yang dialami oleh masyarakat terutama remaja dan anak-anak terjadi secara berkepanjangan, dapat mempengaruhi kesehatan fisik terutama pada tekanan darah yang berakibatkan pada hipertensi. Selain hipertensi, pengaruh penggunaan sosial media terhadap kesehatan fisik yaitu pada remaja dan anak-anak yang kecanduan sosial media seringkali membatasi aktivitas fisiknya yang berakibat banyak anak mengalami obesitas atau kenaikan berat badan. Masalah yang lain yaitu adanya gangguan kesehatan mata dan masalah insomnia yang sering terjadi dikalangan masyarakat. Dibuktikan bahwa banyak yang mengalami kecanduan dalam bermain sosial media mengalami depresi, stress, kecemasan hingga kesepian hidup.
Layanan kesehatan jiwa yang diharapkan dapat lebih baik	Generasi baru menjadi periode kritis untuk kesehatan mental remaja dan anak muda di Indonesia	Pada periode ini, banyak remaja harus menjelajahi lingkungan baru, lingkaran pertemanan yang semakin luas, dan tuntutan pendidikan atau karier yang semakin berat. Hingga budaya yang berbeda disertai dengan masalah dan konflik yang kerap muncul dari berbagai perubahan ini. Adapun penyelesaian masalah yang sering dilakukan adalah bercerita pada teman dan mencari cara mengatasi masalah dari internet yang dilakukan untuk menghindari masalah tersebut. Namun, ada juga yang berakhir dengan menyakiti diri atau bahkan putus asa dengan mengakhiri hidup. Adanya faktor

		<p>remaja yang tidak mencari bantuan untuk kesehatan jiwa, karena tidak memiliki akses kesehatan jiwa. Tapi, ada faktor lain yang menjadi penghambat yaitu layanan yang kurang sesuai dengan kebutuhan remaja diusia mereka. Misalnya mereka mengharapkan layanan bantuan kesehatan yang menjamin kerahasiaan, tidak menghakimi, berkelanjutan dengan waktu tertentu, serta dapat diakses secara online. Beberapa remaja mengatakan takut menceritakan ke orang tua atau orang terdekat bahwa mereka datang kelayanan kesehatan mental karena takut dianggap “orang dengan gangguan jiwa berat.”</p> <p>Padahal pemahaman remaja sangat penting agar mereka dapat mengidentifikasi masalah sejak dini sehingga mendapatkan bantuan yang sesuai.</p> <p>Oleh karena itu, perlu intervensi yang lebih baik untuk membantu para remaja di periode yang kritis ini agar dapat mengenali masalah yang dihadapi, memahami cara meghadapi stres, dan membangun ketahanan mental. Utamanya, berbagai layanan harus menjamin kerahasiaan, tidak menghakimi, dan terbuka untuk mendengarkan masalah remaja di periode ini.</p>
<p>Perlunya perlindungan hak asasi manusia dalam Hukum Administrasi Negara</p>	<p>Upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat sebagai hak asasi manusia dalam administrasi negara</p>	<p>Perlindungan hak asasi manusia sangat penting dalam konteks administrasi negara dengan fondasi dari keadilan, kebebasan, dan martabat manusia. Administrasi negara setiap warga negara memiliki akses yang adil dan setara terhadap layanan, perlindungan, dan keadilan dibawah hukum. Juga membanu penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan dan meningkatkan legitimasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.</p> <p>Administrasi negara memiliki kekuasaan yang signifikan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Administrasi negara yang baik dan efektif memiliki peran penting dalam pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia dalam kebijakan dan tindakan administratif, pemerintahan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan politik.</p> <p>Beberapa cara perlindungan hak asasi manusia dapat implementasi dalam konteks administrasi negara;</p>

		<p>1. Konstitusi dan Hukum Melindungi hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hak dalam kehidupan, dan hak-hak lain.</p> <p>2. Lembaga perlindungan hak asasi manusia Administrasi negara harus mendirikan dan memperkuat lembaga independen yang bertanggungjawab untuk memantau, melindungi, dan mempromosikan hak asasi manusia.</p> <p>3. Kebijakan dan Prosedur Prosedur yang jelas untuk penanganan keluhan dan pengaduan terkait perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, etnis minoritas, migran, dan penyandang disabilitas.</p> <p>4. Pelatihan dan Kesadaran Aparat negara dan petugas Administrasi negara harus diberikan pelatihan yang memadai tentang hak asasi manusia, prinsip-prinsipnya, dan cara mengimplementasikan dalam tugas sehari-hari mereka.</p> <p>5. Transparansi dan Akuntabilitas Administrasi negara harus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan dan keputusan mereka. Mekanisme pengawasan independen, audit, dan evaluasi kinerja administrasi negara harus diterapkan untuk memastikan pemenuhan hak asasi manusia dan mendeteksi serta menindak pelanggaran yang terjadi.</p> <p>6. Kerjasama Internasional Hal ini meliputi partisipasi dalam perjanjian dan instrumen hak asasi manusia internasional, kerjasama dengan organisasi regional dan internasional, serta pertukaran pengalaman dan praktik terbaik dengan negara lain dalam hal perlindungan hak asasi manusia.</p> <p>Implementasi perlindungan hak asasi manusia dalam administrasi negara adalah upaya berkelanjutan yang memerlukan komitmen politik, koordinasi antarlembaga, partisipasi masyarakat sipil, dan pemantauan yang ketat untuk memastikan pemenuhan hak asasi manusia dalam semua aspek tindakan pemerintah.</p>
--	--	---